

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan

Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, setidaknya-tidaknya pada tahap awal pembangunan. Yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial (Afifuddin, 2010:100).

Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya (*objective*), sasaran yang akan dicapai (*target*), cara mengukur keberhasilannya (*performance evaluation*), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakannya, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya (Afifuddin, 2010:100).

Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam hal ada otonom atau desentralisasi. Untuk itu perlu ada mobilisasi tenaga serta kesiapan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya (Afifuddin, 2010:100).

Proyek dapat pula dilaksanakan oleh badan lain diluar pemerintah, biasanya perusahaan swasta, baik asing maupun dalam negeri atau campuran. Badan tersebut dapat ditunjuk langsung ataupun dapat dipilih melalui pelelangan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah seperti dijelaskan diatas, adalah tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara seefisien mungkin (Afifuddin, 2010:101).

2.2 Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat (All Annas, 2016:14).

Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Sondang P.Siagian 2005:52)

Secara umum infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang berjalannya kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan efesiensi dari aktifitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dibuat sesuai permintaan seefisien mungkin yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Misalnya, Pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam dunia fisik, termitologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti listrik, air, jalan, jembatan, dan pembuangan air serta layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk :

- a. Digunakan bersama-sama oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan fisik.
- c. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
- d. Terpisah dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.
- e. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.

Sedangkan secara teknik, infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air bangunan dan fasilitas publik lain yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang terpenting.

2.3 Otonomi Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat Politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan istitusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Haw Wijaya, 2003:4).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6, Disebut bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian Desa diatas, maka dapat ditarik cirri-ciri Desa secara umum:

- a. Desa pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
- b. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan yang dominan.
- c. Tidak seperti dikota-kota besar yang pemnduduknya sebagian besar merupakan pendatang dari populasi Desa.
- d. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan intragasi antar warga Desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 (12), Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- e. Membina perekonomian Desa.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- g. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas dikaitkan dengan pembangunan Desa merupakan proses perubahan yang terus-menerus berlangsung pada masyarakat Desa yang mana merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Bangsa.

Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Masyarakat di Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratis dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, mendorong, menciptakan akases agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan Desa Sungsi Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Mempunyai makna yang hakiki bagi Masyarakat Indonesia, karena menyentuh segenap lapisan melalui pembangunan yang komperherensif. Menyebar luas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruh Pedesaan dan mengenali dan mengerjakan partisi pasinya berusaha memandukan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijakan terbatas pada Daerah Propinsi serta Desa ditempatkan pada pangkuan otonomi asli.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bab V, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) pada Pasal 23 sampai dengan pasal 66, merupakan masa transisi dan memberikan landasan yang kuat menuju *development community*, dimana desa tidak lagi merupakan level administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, tetapi lebih merupakan *independent community*.

Menurut Haw Widjaja (2005:85) dengan demikian, dalam peraturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan Desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat.
- b. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- d. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa.
- e. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
- f. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas).
- g. Pengembangan ekonomi usaha masyarakat.
- h. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- i. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

2.5 Pembangunan Desa

Definisi pembangunan menurut (Sondang P. Siagian:2005) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang Pemerintah untuk pembangunan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, yang dijelaskan pada BAB VI tentang perencanaan pembangunan desa pasal 63 ayat 1, 2 dan 3:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten /Kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- c. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa.

Menurut UU No.66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa membuat dalam suatu rencana pembangunan berdasarkan:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Desa dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material.

Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa, sesuai dengan apresiasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah Desa maupun masyarakat.
- e. Selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- f. Efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksana perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- g. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- h. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
- i. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang hingga mendapat hasil yang terbaik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pengalihan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan pengalihan informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 BAB

II tentang perencanaan pembangunan desa dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan pasal 5 ayat (1), (2), (3):

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten karimun dapat dilihat pada surat keputusan kepala Desa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai berikut:

- a. Menetapkan karyawan sebagai sebagai sekertaris sebagai penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sungai Sebesi.
- b. Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota harus memahami fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk dan panduan yang telah ditetapkan.
- c. Tim penyusun bertugas memulai dari pengkajian permasalahan, kebutuhan dan potensi Desa, mengadakan musyawarah untuk menyusun rencana pembangunan dan hasil yang telah disepakati.
- d. Rencana pembangunan Desa disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan mensinkronkan kegiatan PNPM, PWPM dan lain-lain.
- e. Masa kerja Tim penyusunan 3 bulan terhitung sejak diterbitkan surat ini.
- f. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sadu Wasistiono (2007:133) menyebutkan bahwa Secara teoritis, perundang-undangan yang sifatnya mengatur (regelling) disebut peraturan, sedangkan perundang-undangan yang sifatnya menetapkan (beschikking) disebut keputusan. Menurut pasal 26 UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Jika ketentuan ini mutatis mutandis dengan RKP-Desa, maka RKP-Desa juga

semestinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa, bukan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2) PP No.72 Tahun 2005.

2.6 Tentang Desa

Menurut Raharjo (2004:13) sosiologi pedesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistemasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang masyarakat pedesaan: organisasi dan strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosialnya yang pokok, dan perubahan-perubahannya.

Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu poin yang paling krusial dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitive. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti syarat jumlah penduduk lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan UU Desa wajib 4.500 orang dan dalam undang- undang tersebut adanya desa persiapan selama 1-3 tahun.

Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait Desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

2.7 Perencanaan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2012:49) perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan.

Menurut Mahduh M. Hanafi (2004:2) perencanaan adalah suatu proses yang mengonisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi.

Dari definisi diatas yang dikemukakan Mahduh M. Hanafi dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu melekat dalam kegiatan perencanaan selalu melekat dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang direncanakan. Dengan melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur, mengendalikan dan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan.

Menurut Johara T. Jayadinata (2006:139) dalam perencanaan terdapat 2 macam tahapan: tahapan makro dan tahapan mikro:

- a. Tahapan makro bertitik tolak dari keadaan sekarang yang kurang memuaskan menuju keadaan yang diharapkan. Keadaan yang diharapkan umumnya tercantum dalam sasaran perencanaan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan regional, dan persatuan regional.
- b. Tahapan mikro, berperan dalam menangani perencanaan berbagai proyek khusus. Dalam hal ini yang penting pula adalah penentuan prioritas antara berbagai proyek supaya mendapat keuntungan yang maksimal.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan fisik.

Dari berbagai penjelasan teori para ahli diatas, maka dapat penulis menjabarkan bahwa dengan melakukan perencanaan yang matang maka kemungkinan-kemungkinan atau akibat yang tidak diinginkan ketika melakukan sesuatu pekerjaan dapat diminimalisir. Karena perencanaan yang produktif merupakan syarat bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan yang optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- nar
eg
ber
nar
den
seg
Dal
pa
mar
erj
lig
tat
did
Islamic
ben
mer
kait
van
ber
aw
ber

Dalam kerangka ini, maka perencanaan dalam suatu pekerjaan yang matang harus memperhatikan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi. Sehingga aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung berdaya guna bersih dan tanggung jawab.

Selain itu juga perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama didunia ia akan mendapatkan keselamatan diakhirat nanti. Dalam setiap langkah gerak manusia harus mengintropesi diri memperhatikan apa-apa yang telah dibuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus dalam kesesatan.

Apa itu perencanaan, yaitu konsep yang lain, sulit dipegang, lebih banyak digembar-gembor dari pada dipraktekan dan lebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan.

Dalam soal lokasi, tercakup hubungan antara biro perencanaan dan fungsi penyusunan anggaran. Karena perencanaan merupakan upaya untuk memahami dan mengontrol komitmen-komitmen yang akan datang, ia harus dilakukan didalam kaitan dengan proses penganggaran. Perencanaan sektoral tumbuh dari perhatian yang lebih awal mengenai keseimbangan antar sektor yang tepat. Dalam praktek perencanaan, ini berarti bahwa suatu bagian dalam sebuah kementerian bertanggung jawab atas perencanaan-perencanaan untuk sektor itu. Mengumpulkan data yang perlu dan mengkomunikasikan rencana itu pada kantor perencanaan pusat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitannya, pengatura keorganisasian semacam ini berarti bahwa para pejabat dalam unit perencanaan sektoral tersebut terjepit antara dua jawatan dalam unit perencanaan.

Menurut Rusyanto L Simatupang (1987:306) perencanaan pembangunan ada dua cara yaitu. Pertama, perencanaan mencakup penghematan sumber-sumber daya langka oleh otoritas yang dibentuk masyarakat banyak. Kedua, perencanaan harus mencakup upaya-upaya yang terorganisasi, sadar dan kontiniu untuk menemukan alternatif-alternatif yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan yang khusus.

Upaya yang sangat berhasil dan menarik untuk mengubah lembaga-lembaga sosial pedesaan guna peningkatan produktivitas dan peningkatan kontrol lokal atas pembuatan keputusan adalah gerakan pembangunan masalah-masalah dan kemungkinan proyek-proyek terpadu pilihan lain yang harus dibuat pemerintah ialah, akankah memfokus pada suatu tugas tunggal atau memakai cara pendekatan rangkap dalam menghadapi masalah-masalah pedesaan. Dari antara-antara kemungkinan ini yang disediakan konsep pembangunan desa terpadu menemukan akarnya dan mulai menyebar luas pada proyek pembangunan desa terpadu biasanya multi sektoral dan multi fungsional disatu atau beberapa lokasi. Semakin terpadunya proyek, makin banayak pula koordinasi yang dilakukan. Dan semua beban koordinasi itu dipikulkan dibahu administrasi tingkat proyek.

Pembangunan pedesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi pembangunan seperti konseptualisme yang terdapat pada diilustrasikannya hubungan antara kurangnya kapasitas administratif dengan keterbelakangan atau kurangnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan. Pembangunan pedesaan menuntut pemikiran-pemikiran untuk memecahkan delima-delima keorganisasian dan soal-soal keprilakuan yang dibicarakan. Pembangunan pedesaan tidak akan terlaksana tanpa program dan rancangan proyek serta pelaksanaannya. Kebutuhan akan kesedehanan dan kebutuhan akan pendekatan-pendekatan empiric yang dibahas merupakan unsur-unsur penting. Dan dengan demikian tampaklah bahwa dalam kenyataan setiap topik yang telah mengandung suatu yang penting.

2.8 Pandangan Islam Tentang Konsep Pembangunan

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-quran dan Sunnah. Sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan dan tujuan semua level.

Nabi Muhammad SAW sebagai rasullulah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan bangsa seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan dalam al-quran pada potongan Q.S Ar-Rad: 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ (الرعد : ١١)

Artinya:” *sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*”.

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan, serta manusia memiliki kuasa sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dan menjalankan tugas sesuai dengan keahlian/kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nuur Ayat 55 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا أُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur Ayat : 55)

Pembangunan dalam islam hendaklah dijalankan dua tahap:

1. Tahapan pembangunan kerohanian
 - a. Tahapan pembangunan paling asas dalam islam.
 - b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu.
 - c. Tumpuan utama pendekatan islam adalah keatas kejiwaan, moral dan etika-etika pembangunan.
2. Tahapan pembangunan fisikal
 - a. Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.
 - b. Tiga tahap keperluan darurat, hajiat dan tahsiniat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam adalah pembangunan yang:

- a. Membawa kebaikan secara keseluruhan manusia
- b. Halal
- c. Mengikuti keperluan, darurat, hajat dan tahsiniat
- d. Bukan untuk kebanggaan
- e. Keuntungan semua pihak

Pembangunan yang diharamkan dalam islam:

1. Pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia
2. Pembangunan yang berasaskan kepada kebendaan semata-mata, contohnya:
 - a. Pembangunan menyebabkan kezaliman kepada manusia
 - b. Pembangunan mengancam kesejahteraan sejagat
 - c. Menjadikan manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah Allah
 - d. Membina rumah judi, pelacuran, hiburan dan lain-lain.

2.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pembangunan Desa

Berdasarkan ketentuan pasal 63 peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (RPJM-Desa) dan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-Des). Yang dimaksudkan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen untuk perencanaan untuk periode 5 tahun yang membuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDDes) adalah dokumen untuk perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pembinaan serta pemikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:56) keberhasilan pembangunan pada masyarakat Desa dapat dilihat dari:

- Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya yang jelas.
- Waktu pelaksanaannya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
- Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Fred W. Riggs (1996:17) bahwa kelompok masyarakat politik yang menjadi dasar bagi pembangunan model ini adalah yang sistemnya “pembangunan” dan gaya sistemnya “rezim pembangunan” setelah mereka dapat digolongkan sebagai “rezim gerakan pembangunan”, masyarakat tersebut biasanya disebut tradisional yang diistilahkan dengan masyarakat “primastik”.

2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pembangunan desa yang mana pada peraturan menteri ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pembangunan desa.

Pada bab III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bagian kedua yaitu tahapan persiapan pada pasal 55:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Tahapan persiapan meliputi:

1. Penetapan pelaksana kegiatan
2. Penyusunan rencana kerja
3. Sosialisasi kegiatan
4. Pembekalan pelaksana kegiatan
5. Penyiapan dokumen administrasi
6. Pengadaan tenaga kerja
7. Pengadaan bahan/material

Pada pasal 58, Penyusunan Rencana Kerja:

1. Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Uraian kegiatan
 - b. Biaya
 - c. Waktu pelaksanaan
 - d. Lokasi
 - e. Kelompok sasaran
 - f. Tenaga kerja, dan
 - g. Daftar pelaksana kegiatan
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pada pasal 59, sosialisasi kegiatan:

1. Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan Rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan anatara lain melalui:

- a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
- b. Musyawarah dusun
- c. Musyawarah kelompok
- d. Sistem informasi desa berbasis website
- e. Papan informasi desa
- f. Media lain sesuai kondisi desa

Pada pasal 70, tahapan pelaksanaan kegiatan:

Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan
2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan
3. Perubahan pelaksanaan kegiatan
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan
7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

Pada pasal 71, rapat kerja pelaksana kegiatan:

1. Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencarian dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Pasal 72:

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, membahas antara lain:
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - b. Pengaduan masyarakat
 - c. Masalah, kendala dan hambatan
 - d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan
 - e. Perubahan kegiatan
2. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Pasal 73, Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa:

1. Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa
3. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa
4. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat perihal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping professional.

Pada pasal 78, Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah:

1. Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa

2. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat
- b. Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat
- c. Penetapan status masalah, dan
- d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah

3. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
- b. Mengutamakan penyelesaian masalah ditingkat pelaksana kegiatan
- c. Mengkonfirmasi kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah
- d. Melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah
- e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarustamaan perdamaian melalui musyawarah desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Pasal 79, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan:

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa
2. Peyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan
3. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2.11 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Haw Widjaja, 2002:76).

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu politik, ekonomi, social dan budaya (Nanang Nugraha, 2013:2).

Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (Kansil, 2008:3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi Daerah itu dinamis, dapat berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan penambahan penyerahan urusan kepada daerah secara bertahap (Kansil, 2008:16).

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasan dalam UUD 1945 antara lain:

- a. pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”
- b. pasal 18 yang menyatakan:

“Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan menganti musyawaratan dalam sitem pemerintah Negara dan hak –hak dan asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004. Otonomi Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari uraian diatas agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Disamping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.12 Penelitian Terdahulu

a. Menurut Muhammad All Annas (2016:13) menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton semua harus berperan sebagai pemain.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan didukung kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan kuesioner. Lokasi penelitian ini sendiri dilakukan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

b. Menurut Muhamad Sanusi (2014:24) bahwa tujuan utama dari pembangunan desa adalah pertumbuhan, persamaan dan kesejahteraan. Namun itu semua tidak bisa dicapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi wawancara dan penyebaran angket kepada masyarakat desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Menurut Akhmarudin (2014:14) bahwa tujuan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif metode pengumpulan data dengan melakukan observasi wawancara dan penyebaran angket kepada masyarakat desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

2.13 Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dan memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan konsep dengan mengoprasionalkan batasan sebagai berikut:

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak megatur rumah tangganya sendiri yang dalam penelitian ini adalah Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

b. Otonomi Desa adalah kewenangan pemerintah desa yang bersifat murni, berupa hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai budaya (kebiasaan, norma-norma dan aturan) yang tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perencanaan adalah penyusunan program kegiatan atau program kerja dan target sasaran yang ingin dicapai dan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan Di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.
- Pembangunan desa adalah suatu tugas yang merupakan tanggung jawab pemerintah dengan kepenghuluan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Sebesi dan dilaksanakan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara bertahap dan berkesinambungan.
- Perencanaan pembangunan desa adalah penyusunan suatu program kegiatan atau kerja yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepenghuluan atau aparatur Desa Sungai Sebesi dengan mengikut sertakan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

Table 2.1 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indicator
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Dalam Desa	Tahapan persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pelaksana kegiatan 2. Penyusunan rencana kerja 3. Sosialisasi kegiatan 4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan 5. Penyiapan dokmen administrasi 6. Pengadaan tenaga kerja 7. Pengadaan bahan/material
	Tahapan pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat kerja pelaksanaan 2. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa 3. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
	Pelestarian dan pemanfaatan	1. Memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan 2. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan 3. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian 4. Pengaplikasian biaya pelestarian dan pemanfaatan
	Pengawasan dan pemantauan	1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa 2. Pengawasan dan pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat 3. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Dalam Desa

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat kerangka pemikiran yang merupakan struktur dalam pembahasan pembangunan desa. Kerangka berpikir yang penulis buat sebagai:

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pembangunan yaitu, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan



Analisis Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Sebesi
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Sumber: peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014

